

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 latar belakang

Kebutuhan akan pengukuran kinerja pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah, didorong oleh akuntabilitas dan transparansi anggaran. Fenomena dalam pemerintahan yaitu program pemberdayaan masyarakat adalah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, terutama bagi kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Kementerian dan lembaga negara memiliki tanggung jawab untuk merancang serta melaksanakan program-program ini, yang biasanya didanai oleh anggaran negara. Namun, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh seberapa efektif, efisien, dan tepat sasaran anggaran tersebut digunakan. Oleh karena itu, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat menghadapi sejumlah tantangan (Iswahyudi et al., 2016). Pertama, kompleksitas birokrasi sering kali membuat proses distribusi anggaran menjadi panjang, yang berpotensi menyebabkan inefisiensi. Kedua, minimnya kapasitas pengawasan, baik dari pihak internal kementerian maupun masyarakat, dapat menciptakan peluang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan dana. Ketiga, terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi mengenai alokasi dan penggunaan anggaran mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi program tersebut (Supriyanto, 2024).

Fenomena selanjutnya sekretaris daerah provinsi lampung, fahrizal darminto menyatakan bahwa peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud komitmen dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. rekomendasi dari BPK dianggap sebagai masukan konstruktif untuk perbaikan pengelolaan keuangan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. pemerintah provinsi lampung berkomitmen untuk mengoptimalkan sistem pengendalian intern dan memperkuat pengawasan internal guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Selama sembilan tahun berturut-turut, pemerintah provinsi lampung berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI, yang menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan keuangan. kepala BPK perwakilan provinsi lampung, masmudi, juga menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan pada beberapa pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, khususnya dalam pengelolaan infrastruktur (Darminto, 2024).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menetapkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terdiri dari beberapa tahapan, termasuk pembuatan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan revaluasi dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja utama (IKU), yang bekerja sama dengan Rencana Kinerja Nasional (Aprilianti et al., 2020)

Otonomi daerah menghasilkan desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dapat menyebabkan perubahan besar dalam cara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membelanjakan uang. Kebijakan

yang diberlakukan oleh otonomi daerah memberikan kepada setiap daerah lebih banyak wewenang pengambilan keputusan (Zainab, 2020). Pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk menggunakan sumber keuangan yang dimilikinya yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat daerah tersebut. Namun dengan adanya wewenang bukan berarti pemerintah daerah dapat menggunakan sumber keuangan yang dimilikinya yang sesuai dengan kepentingan individu tanpa ada arah dan tujuan yang jelas. Hak dan wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang ada di daerah tersebut maupun pemerintah pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah Indonesia (Zainab, 2020).

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti: pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara (Zainab, 2020). Akuntabilitas kinerja merupakan seseorang atau unit organisasi bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai untuk mencapai tujuan (Syuliswati & Asdani, 2017). Akuntabilitas atau bentuk pertanggung jawaban adalah sebuah bentuk keharusan yang perlu dilakukan oleh pemerintahan yang menjadi pelaku administrasi pembangunan sekaligus pengelola keuangan terhadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat atau kelompok sasaran. Prinsip akuntabilitas ini memiliki pengertian bahwa kinerja dan tindakan pemerintah kota Surabaya dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam sebuah pemerintahan, akuntabilitas menunjukkan kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan, sehingga peran pemerintah

sebagai agen merupakan faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah kepada rakyat atau prinsipal, untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas pemerintahan ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan penelitian Syuliswati & Asdani (2017);Zainab (2020); (Utami et al., 2016);Mualifu et al. (2019) faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja diantaranya perencanaan, laporan realisasi anggaran, evaluasi anggaran, dan transparansi.

Berlakunya undang-undang UU No.23/2014 dan UU No.33/2004 diberlakukan, daerah akan diminta untuk mengatur dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum. Untuk mencapai hal ini rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) harus dibuat (Utami et al., 2016).

Urgensi pada penelitian dengan judul “Pengaruh Perencanaan Anggaran, Laporan Realisasi Anggaran, dan Evaluasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Tingkat Transparansi sebagai Variabel Moderasi” dinilai sangat penting oleh para informan, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan sektor publik yang dituntut semakin akuntabel dan transparan. Menurut informan, perencanaan anggaran yang tepat akan menentukan efektivitas penggunaan sumber daya, karena perencanaan yang matang memungkinkan alokasi anggaran sesuai kebutuhan prioritas organisasi (Mardiasmo, 2021). Selanjutnya, laporan realisasi anggaran menjadi alat untuk mencerminkan ketaatan terhadap rencana anggaran yang telah ditetapkan dan memberikan gambaran atas penggunaan dana publik secara nyata (Mahmudi, 2016). Evaluasi anggaran pun tidak kalah penting, karena menjadi instrumen untuk menilai keberhasilan pelaksanaan anggaran dan dasar pengambilan keputusan di periode berikutnya (Ikhsan et al.,

2014). Namun, informan juga menyatakan bahwa tingkat transparansi memiliki peran yang sangat krusial dalam memperkuat hubungan antara ketiga variabel tersebut dengan akuntabilitas kinerja. tanpa adanya Transparansi yang memadai, proses perencanaan, pelaporan, dan evaluasi anggaran tidak akan sepenuhnya dapat dipercaya oleh publik dan pemangku kepentingan (Umam & Setiyowati, 2023). Transparansi memungkinkan akses informasi yang jelas dan terbuka sehingga mendorong pengawasan partisipatif dan menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi (Yanti et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana mekanisme tersebut saling mempengaruhi dan diperkuat oleh Transparansi dalam upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja yang optimal.

Perencanaan anggaran merupakan penjelasan rencana yang terperinci mengenai pemasukan dan pembiayaan organisasi, agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Ramadhani et al., 2022). Penelitian tentang perencanaan anggaran yang dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Syuliswati & Asdani (2017); Setya Nusa & Mutmainnah (2022) yang meneliti pengaruh perencanaan terhadap akuntabilitas kinerja hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Faktor yang selanjutnya ialah laporan realisasi anggaran. Berdasarkan Standar akuntansi pemerintahan (2010), Laporan realisasi Anggaran (LRA) merupakan pelaporan yang membandingkan anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan LRA dibuat untuk memberikan informasi tentang hasil dan anggaran entitas pelaporan, penyandingan antara anggaran dan pelaksanaannya menunjukkan seberapa banyak tujuan yang telah dicapai oleh legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-perundangan (Liando

& Elim, 2016). Penelitian tentang laporan realisasi anggaran yang dilakukan oleh Zainab (2020) yang meneliti pengaruh laporan realisasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Evaluasi anggaran merupakan serangkaian tindakan yang digunakan untuk mengevaluasi masalah anggaran yang terkait dengan program yang telah dibuat sebelumnya dengan tujuan untuk mencegah masalah tersebut muncul di kemudian hari (Winarmo, 2008). Penelitian tentang evaluasi anggaran yang dilakukan oleh (Utami et al., 2016) yang meneliti pengaruh evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi anggaran mempunyai pengaruh secara tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Faktor berikutnya dalam mendukung akuntabilitas adalah transparansi. Transparansi merupakan kebebasan untuk melihat aktivitas politik dan ekonomi pemerintah saat pengambilan keputusan, dan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas keuangan, pengungkapan, dan pematuhan terhadap undang-undang (Mualifu et al., 2019). Akuntabilitas dalam pemerintahan mengharuskan setiap instansi untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Dengan adanya akuntabilitas yang kuat, pemerintah dapat menunjukkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran negara, yang pada gilirannya menjaga kepercayaan publik. Selain itu, akuntabilitas kinerja berperan penting dalam memastikan bahwa setiap program pemerintah dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa akuntabilitas yang memadai, risiko penyalahgunaan wewenang dan efisiensi dalam pelayanan publik akan

meningkat. Oleh karena itu, penerapan sistem akuntabilitas yang efektif sangat krusial untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dan bertanggung jawab, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan juga merupakan dasar bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (AFILA, n.d.)

Memilih variabel akuntabilitas kinerja sangat penting dalam sebuah sistem anggaran dan organisasi sebab variabel tersebut mencerminkan sejauh mana sistem anggaran dan suatu organisasi dapat mempertanggungjawabkan hasil dan proses yang telah dilaksanakan kepada pemangku kepentingan. Akuntabilitas kinerja tidak hanya meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya. Dengan mengukur akuntabilitas kinerja, organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, memastikan bahwa tujuan strategis tercapai, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu akuntabilitas kinerja juga berperan dalam menciptakan budaya organisasi yang bertanggung jawab, di mana setiap individu merasa memiliki peran dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu variabel ini menjadi kunci dalam menilai efektivitas dan keberlanjutan suatu organisasi.

Perencanaan anggaran, laporan realisasi anggaran, dan evaluasi anggaran memiliki hubungan yang erat dengan akuntabilitas kinerja dalam suatu organisasi atau lembaga. Perencanaan anggaran yang baik akan memberikan dasar yang jelas untuk pengeluaran dan penggunaan sumber daya, sementara laporan realisasi anggaran berfungsi sebagai alat untuk memantau dan melaporkan sejauh mana anggaran tersebut telah digunakan sesuai dengan rencana. Evaluasi anggaran, disisi lain, memungkinkan analisis terhadap

efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran, sehingga dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Ketiga variabel tersebut saling terkait dan berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas kinerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

Tingkat transparansi berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan dalam hubungan ini. Ketika transparansi tinggi, informasi mengenai perencanaan, realisasi, dan evaluasi anggaran dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini mendorong partisipasi aktif dan pengawasan yang lebih baik, sehingga akuntabilitas kinerja dapat ditingkatkan. Sebaliknya, jika transparansi rendah, maka informasi yang terbatas dapat menghambat pengawasan dan mengurangi kepercayaan publik, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas akuntabilitas kinerja. Dengan demikian, transparansi tidak hanya memperkuat hubungan antara ketiga elemen anggaran dan akuntabilitas, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara pengelolaan anggaran dan kepercayaan masyarakat (Iswahyudi et al., 2016).

Variabel perencanaan anggaran, laporan realisasi anggaran, dan evaluasi anggaran dapat dimoderasi, dan tingkat transparansi berperan penting dalam penelitian ini. Tingkat transparansi dapat mempengaruhi hubungan antara perencanaan anggaran dan akuntabilitas kinerja, dimana perencanaan yang dilakukan secara terbuka memungkinkan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan yang konstruktif, sehingga meningkatkan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, laporan realisasi anggaran yang disajikan dengan transparan dapat memperkuat akuntabilitas, karena masyarakat dapat dengan mudah menilai kinerja pemerintah berdasarkan informasi yang jelas dan terbuka.

Begitu pula, evaluasi anggaran yang dilakukan secara transparan mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab atas hasil yang dicapai, karena hasil evaluasi yang dipublikasikan dapat diakses oleh publik. Dengan demikian, tingkat transparansi berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat hubungan antara ketiga variabel tersebut dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi serta berdasarkan penelitian terdahulu dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk membuktikan “Pengaruh Perencanaan, Laporan Realisasi Anggaran, Evaluasi Anggaran, Tingkat Transparansi Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Surabaya”.

1.2 Rumusan masalah

1. Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Surabaya ?
2. Apakah Laporan Realisasi Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Surabaya?
3. Apakah Evaluasi Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Surabaya ?
4. Apakah Tingkat Transparansi dapat memoderasi hubungan Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja ?
5. Apakah Tingkat Transparansi dapat memoderasi hubungan Laporan Realisasi Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja ?
6. Apakah Tingkat Transparansi dapat memoderasi hubungan Evaluasi Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja ?

1.3 Tujuan penelitian

1. Mengetahui pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota surabaya
2. Mengetahui pengaruh laporan realisasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota surabaya
3. Mengetahui pengaruh evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota surabaya
4. Mengetahui pengaruh tingkat transparansi sebagai variabel moderasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota surabaya

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti khususnya mengenai pengaruh perencanaan anggaran, laporan realisasi anggaran, evaluasi anggaran, tingkat transparansi sebagai variabel moderasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota surabaya.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang bagaimana pengaruh perencanaan anggaran, laporan realisasi anggaran, evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota surabaya. Selain itu penelitian ini dapat memperkaya bahan kajian untuk peneliti selanjutnya.

3. Bagi Mahasiswa Akuntansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa, khususnya jurusan akuntansi untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya.

4. Bagi Pemerintahan Kota Surabaya

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah kota surabaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.